

# PERANAN TOKOH MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

## *THE ROLE OF LOCAL COMMUNITY LEADERS IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT*

**Ahmad Suhendi**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur  
Email: ahmadsuhendi.lexus@gmail.com

Diterima: 21 April 2013, Disetujui: 1 Juli 2013

### **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada para pemerintah daerah sebagai pengguna model, pemangku kepentingan, unit terkait di lingkungan Kementerian Sosial, dan pengambil kebijakan di instansi yang terkait langsung dengan permasalahan kesejahteraan sosial. Pada umumnya pembangunan kesejahteraan sosial mendatangkan manfaat bagi peningkatan pengetahuan para perwakilan pranata sosial dalam menggali potensi dan sumber, dan menangani masalah kesejahteraan sosial lokal. Hal itu dapat terjadi karena kontribusi dan peranan tokoh masyarakat lokal yang proaktif di dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial diwilayahnya.*

**Kata kunci:** model, tokoh masyarakat lokal, peranan, pembangunan kesejahteraan sosial.

### **Abstract**

*This article to provide more comprehensive information to the local government as model users, stakeholders, the relevant agencies under the Ministry of Social Affairs, and policy makers regarding to social welfare issues directly. It is generally known that the research conducted will benefit to increase in knowledge of the representatives of the social institutions in exploration the potential and resources, and solve the local social welfare problems. It may occur due to the role of the local community leaders was proactive to implementing the social welfare development in their environment.*

**Key words:** model, local community leader, role, social welfare development.

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara besar yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Dilihat dari posisinya, NKRI berada pada posisi yang sangat strategis karena diapit oleh dua samudra dan dua benua. Dengan keberadaan yang sangat strategis tersebutlah NKRI menjadi jalur yang strategis pula dalam dunia perhubungan dan perdagangan. Sejak kemerdekaan NKRI tahun 1945, sejak itu pula NKRI mulai berbenah diri untuk membangun dari keterpurukannya akibat penjajahan terutama dari Kerajaan

Belanda dan Kekaisaran Jepang. Demikian pula dengan sistem pemerintahan terus berkembang dari era atau zaman yang disebut Orde Lama beralih ke Orde Baru, dan dari Orde Baru menjadi Era Reformasi sampai sekarang.

Salah satu konsekuensi di Era Reformasi adalah penguatan kewenangan daerah untuk menata dan mengatur pembangunan daerahnya yang dikenali dengan Otonomi Daerah. Namun kenyataan ketika terjadi permasalahan kesejahteraan sosial seperti bencana alam, meningkatnya masalah kemiskinan, kerusakan atau konflik sosial, kekurangpedulian

masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan hidup, melunturnya nilai-nilai kemasyarakatan ataupun melemahnya peran dan fungsi pranata sosial, serta masalah sosial lainnya. Pemerintah daerah sebagai pengelola langsung wilayahnya menghadapi banyak kendala dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah boleh dikatakan belum siap dan belum mampu untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial secara mandiri yang muncul atau terjadi di wilayahnya tanpa bantuan fasilitasi pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap memfasilitasi melalui anggaran pedapatan dan belanja negara untuk membantu secara maksimal dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul.

Berkaitan dengan itu, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial berusaha menjawab permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi dan dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya pada komunitas lokal melalui berbagai model kajian atau penelitian. Salah satu penelitian yang dijalankan adalah Model Pengembangan Desa Berketahanan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian aksi melalui Pemberdayaan Pranata Sosial. Penelitian ini dimaksudkan untuk merespon dan menangani kekurangberfungsian atau melemahnya peran dan fungsi “Pranata Sosial” yang terdapat pada komunitas lokal, baik di tingkat desa maupun kelurahan.

Masalah kesejahteraan sosial dapat muncul di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Peningkatan masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun baik jenis dan kualitasnya juga semakin kompleks, sehingga di dalam penanganannya harus dilakukan secara terkoordinasi walaupun pada tingkat desa atau kelurahan sekalipun. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan klasi/kasi dari Pusat Data dan Informasi

Kementerian Sosial RI terdapat 22 (dua puluh dua) jenis mulai dari Balita telantar sampai dengan Lanjut Usia telantar. Dari 22 jenis PMKS ini bukan tidak mungkin juga dialami sampai di tingkat desa. Namun demikian, permasalahan kesejahteraan sosial yang ada pada tingkat desa atau kelurahan tidak dapat ditangani secara maksimal, baik oleh aparat pemerintahan setingkat desa atau kelurahan maupun oleh tokoh dan warga masyarakat karena terbatasnya kemampuan mereka dalam mengatasinya. Pada kondisi seperti itulah diperlukan “intervensi” dari luar dengan cara memberikan sentuhan atau penguatan terhadap para tokoh masyarakat yang tergabung dalam pranata sosial untuk bangkit dan maju.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, penyandang cacat, fakir miskin, lanjut usia terlantar, korban bencana alam, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya selama ini telah dilakukan oleh berbagai pihak. Pihak tersebut, baik dari instansi pemerintah, swasta, organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat yang peduli terhadap berbagai masalah sosial. Pada implementasi penanganannya pun telah ada yang dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable*). Berkaitan dengan hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, bahwa “penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Pada dasarnya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial memerlukan berbagai cara, baik itu pikiran, tenaga, dana, metode, maupun alat bantu lainnya. Pada

tataran inilah harus muncul tokoh-tokoh lokal tertentu dalam melaksanakan peranannya untuk merespon dan menangani masalah kesejahteraan sosial yang muncul di wilayahnya. Tokoh-tokoh lokal tersebut dapat memotivasi warga masyarakat melalui peranannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dari model yang dilaksanakan melalui penelitian inilah lahir Kelompok Kerja Ketahanan Sosial Masyarakat (Pokja Tansosmas) yang dibentuk dari dan oleh pranata sosial itu sendiri untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial lokal. Dibentuknya Pokja Tansosmas tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kerjasama antara unsur perwakilan pranata sosial yang ada pada komunitas lokal dalam melakukan penanganan berbagai masalah kesejahteraan sosial yang terdapat dan muncul di lingkungan setingkat desa/kelurahan. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mencoba membahas beberapa tema yang terkait dengan peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan sosial yaitu Tokoh Masyarakat Lokal, Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dan Peranan Tokoh Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Beberapa konsep yang dianggap relevan dengan topik bahasan digunakan dalam tulisan ini untuk memperkaya istilah, antara lain :

1. Pranata Sosial adalah suatu sistem nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Kelompok Kerja Ketahanan Sosial Masyarakat adalah kelompok kerja yang dibentuk dari dan oleh unsur pranata sosial lokal yang bekerja karena adanya kepedulian sosial dalam rangka ikut ambil bagian dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada pada komunitas lokal. Kelompok kerja ini dibutuhkan keberadaannya pada komunitas lokal untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat itu sendiri. Kelompok kerja ini muncul setelah ada pelaksanaan penelitian Model Desa Berketahanan Sosial di lokus kegiatan yang dilakukan peneliti Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Suhendi, 2010, hal. 25).
3. Stimulan adalah sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja, pendorong, atau perangsang (Kamus Besar Bahasa Indonesia:2001). Stimulan dalam bahasan ini merupakan bantuan dana tunai yang dijadikan sebagai “kail atau perangsang” dalam rangka menggali potensi dan sumber untuk digunakan Pokja Tansosmas sebagai modal awal dalam rangka usaha untuk menangani permasalahan sosial yang ada pada komunitas lokal.
4. Potensi adalah berbagai hal yang belum digali dan dimanfaatkan yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber dalam rangka usaha untuk menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada pada komunitas lokal.
5. Sumber adalah berbagai hal yang sudah kelihatan, tersedia, dan dapat digali untuk dimanfaatkan atau digunakan sebagai bahan atau sarana dalam rangka usaha penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada pada komunitas lokal.
6. Ketahanan Sosial Masyarakat adalah suatu kemampuan komunitas (masyarakat) dalam mengatasi resiko akibat perubahan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Suatu komunitas dikatakan memiliki ketahanan sosial apabila komunitas tersebut mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan; mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial; mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik atau tindak kekerasan; dan mampu mengembangkan kearifan lokal dalam memelihara sumber daya alam maupun sosial (Kepmensos RI No. 12 Tahun 2006).

7. Kesejahteraan sosial menurut Midgley (1997) dalam Huda (2009) mengatakan, bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu; 1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik; 2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan 3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Dari batasan tersebut, maka kesejahteraan sosial dapat dicermati sebagai “kondisi” dan sebagai “sistem, kebijakan, dan program”. Kesejahteraan sosial sebagai “kondisi”, terletak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan dalam hal ini dimaksudkan dipengaruhi oleh kondisi fisik, pendidikan, keterampilan, nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat. Sebagai kondisi, kesejahteraan sosial juga diamanatkan dalam Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan kesejahteraan dilihat sebagai “sistem, kebijakan, dan program”, terletak pada kekuatan ataupun kekuasaan yang ada di luar masyarakat. Friedlander dalam Soetarso (1980) mengatakan, bahwa kesejahteraan sosial sebagai sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga-lembaga sosial untuk membantu orang, baik sebagai individu maupun kelompok. Demikian halnya Wickenden dalam Soetarso (1980) mengatakan, bahwa kesejahteraan sosial sebagai undang-undang, program, dan pelayanan-pelayanan yang menjamin dan memperkuat penyediaan berbagai jenis kebutuhan dasar warga negara.

Berdasarkan beberapa konsep tersebut, maka dapat dikatakan satu sama lain saling berkaitan di dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pada kenyataan di lapangan, bahwa

pembangunan kesejahteraan sosial pada komunitas lokal dapat dilakukan karena peranan tokoh masyarakat lokal yang proaktif dalam hal ini sebagai perwujudan dari pranata sosial. Pranata sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, membutuhkan potensi, sumber, dan stimulan. Tokoh masyarakat lokal yang diwujudkan melalui pranata sosial, bekerja bergotong royong secara efektif dan efisien dilakukan dalam kelompok kerja untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Apabila ketahanan sosial masyarakat dapat terwujud, maka pembangunan kesejahteraan sosial dapat dicapai.

## PEMBAHASAN

### Tokoh Masyarakat Lokal

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian di atas, bahwa untuk “merespon dan menjawab” berbagai masalah kesejahteraan sosial yang muncul pada komunitas lokal, baik di itu yang terjadi pada tingkat perkotaan maupun di perdesaan diperlukan peranan tokoh masyarakat lokal. Terkait dengan itu Tanto (2012), mengatakan bahwa tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Dengan demikian penokohan seseorang tentunya bersifat tergantung dari waktunya (*time speci c*) dan tergantung dari tempatnya (*culture speci c*). Seorang yang ditokohkan biasanya memiliki sifat keteladanan. Artinya dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya. Oleh karena itu dalam ajaran kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki tiga sifat utama yaitu *ing ngarsa sung tuladha*, *ing madya mangun karsa*, dan *tut wuri handayani*. Hal yang demikian tentunya harus dimiliki pula pada mereka yang ditokohkan oleh masyarakat. Selain itu menurut Tanto,

banyak alasan mengapa seseorang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat, diantaranya adalah karena pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian, keturunan, dan lain-lain. Namun demikian berbagai faktor yang menjadi latar belakang seseorang menjadi tokoh tidak akan baik kalau dalam dirinya tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu kemampuan mempengaruhi orang lain merupakan perpaduan yang baik jika digabungkan dengan faktor-faktor tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki atribut tersebut ditambah jiwa kepemimpinan dan keteladanan, maka orang tersebut akan semakin ditokohkan.

Namun demikian menurut Tanto, “seiring dengan berjalannya waktu, maka setelah reformasi peran tokoh masyarakat sedikit demi sedikit memudar meskipun belum bisa dikatakan hilang sama sekali. Pergolakan politik pada masa reformasi banyak memunculkan tokoh-tokoh politik, tetapi belum tentu mereka bisa menjadi tokoh masyarakat”. Berkaitan dengan pendapat tersebut, kenyataannya masih ditemukan di berbagai lokus penelitian terjadi penurunan atau melemahnya peran tokoh masyarakat. Terutama dalam hal ini pranata sosial dan kepedulian masyarakat terhadap PMKS, kekurangtahuan masyarakat untuk berpartisipasi atau memanfaatkan keberadaan organisasi sosial lokal, mudahnya masyarakat untuk ikut melakukan tindakan yang terkait dengan konflik sosial atau tindak kekerasan, dan kurang terpeliharanya kearifan lokal dalam rangka mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial. Oleh karena itu pada prakteknya peneliti tidak menangani secara langsung (*indirect services*) terhadap masalah kesejahteraan sosial tersebut. Akan tetapi melalui keberadaan tokoh masyarakat lokal yang diwujudkan dalam “pranata sosial” sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang diberdayakan melalui alih teknologi

sosial dalam hal ini memberikan pengetahuan antara lain mengidentifikasi PMKS dan PSKS, menganalisis PMKS sebagai prioritas penanganan, memformulasikan dan membuat rencana aksi, serta melaksanakan rencana aksi di tingkat desa atau kelurahan, karena peranannya yang mulai melemah tersebut.

Berkaitan dengan pranata sosial sampai-sampai seorang Presiden Republik Indonesia dalam berbagai pertemuan, baik formal maupun informal selalu mengaitkan dengan peran dan fungsi pranata sosial. Satu momen penting ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono ikut dalam acara “Berzikir untuk Negeri” di Lapangan Silang Monas (Media Indonesia, 2010:3) mengatakan, bahwa “..... agar ekspresi kebebasan harus tetap berpegang pada “pranata sosial” dan norma hukum, sehingga bangsa ini jauh dari kekerasan dan perpecahan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa “Bangsa Indonesia terus diharapkan menjadi masyarakat yang baik, rukun, bersatu, toleran, dan memelihara persaudaraan, santun bertata krama, serta taat pada “pranata sosial” dan hukum”.

Berkaitan dengan itu pula kiprah peneliti melakukan kegiatan yang sasarannya tokoh masyarakat lokal yang tergabung dalam pranata sosial di berbagai daerah melalui kajian atau penelitian aksi model pemberdayaan. Satu model yang dianggap berhasil yakni Model Desa/Kelurahan Berketahanan Sosial atau disebut juga Model Pengembangan Desa/Kelurahan Berketahanan Sosial. Model ini sudah banyak direplikasikan di berbagai daerah, baik di kota maupun di kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan pada tingkat desa atau kelurahan sebagai lokus pelaksanaan kegiatannya. Hasil pelaksanaan model tersebut dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota bahkan provinsi dalam

rangka meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melindungi dan membantu kelompok rentan dan PMKS lainnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan organisasi sosial lokal, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya konflik sosial atau tindak kekerasan, dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memelihara kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial. Atau dengan kata lain ikut berkiprah dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan, bidang lainnya di tingkat lokal.

Dari implementasi di berbagai daerah tersebutlah, muncul respon yang positif dari pemerintah daerah untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan model yang sama di desa atau kelurahan dengan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu model desa berketahanan sosial boleh dibilang model yang banyak diminta pemerintah daerah sebagai pengguna (*user*). Pada implementasinya, model tersebut melibatkan para tokoh masyarakat lokal yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur pranata sosial lokal yang tergabung dalam suatu kelompok kerja. Secara umum gambaran mengenai kelompok kerja atau lengkapnya Kelompok Kerja Ketahanan Sosial Masyarakat (Pokja Tansosmas) yaitu suatu kelompok kerja (*tim work*) yang peduli terhadap masalah kesejahteraan sosial yang terdapat di lingkungan tempat tinggal dimana kelompok tersebut berada. Pokja Tansosmas dalam tulisan ini merupakan suatu kelompok kerja yang dibentuk “dari” dan “oleh” unsur pranata sosial lokal yang bekerja “untuk” masyarakat atau komunitas lokal dalam usaha ikut ambil bagian dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang muncul di tempat tinggal mereka. Pokja Tansosmas ini di dalamnya terdiri dari unsur tokoh-tokoh masyarakat lokal yang terdapat di

komunitas lokal tersebut, baik dari tokoh formal seperti aparat desa, guru maupun tokoh non-formal seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda (Karang Taruna), tokoh wanita (Kader PKK), Pengurus RT, Pengurus RW, Pengurus Organisasi Sosial ataupun Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh yang lainnya. Unsur tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat pada komunitas lokal atau level desa/kelurahan biasa disebut juga sebagai perwujudan pranata sosial.

Pokja Tansosmas dalam satu tim kerja yang terdapat di desa atau kelurahan terdiri dari 30 (tiga puluh) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Ketiga puluh orang tersebut sebagai perwujudan dari berbagai unsur pranata sosial yang memang dipilih dan ditentukan oleh tokoh kunci desa atau kelurahan untuk mewakili unsur yang ada di desa atau kelurahan setelah Tim Fasilitator Pusat dan Daerah memberikan kriteria ketokohnya melalui diskusi di lokus ketika penjajagan dilakukan. Ketiga puluh orang tersebut sebagai agen pembangunan yang diberikan bimbingan sosial atau pemberdayaan oleh fasilitator pusat dan daerah mengenai berbagai materi yang berkaitan dengan **ketahanan sosial masyarakat**. Melalui 30 orang itulah nantinya diharapkan bisa menjadi pionir penggerak pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang lainnya untuk mengembangkan desa atau kelurahan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakatnya.

Pada prinsipnya ketiga puluh orang yang tergabung dalam pokja tansosmas merupakan satu kesatuan dari empat sub kelompok sebagai perwujudan empat dimensi yang terdapat pada konsep ketahanan sosial masyarakat. Keempat dimensi ketahanan sosial masyarakat sebagaimana dikemukakan pada Model Desa Berketahanan Sosial dalam Suhendi (2007) yaitu; 1) Perlindungan sosial terhadap kelompok

rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 2) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi sosial lokal; 3) Pengendalian terhadap kondisi sosial dan atau tindak kekerasan sosial lainnya; dan 4) Pemeliharaan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya sosial. Keempat dimensi ketahanan sosial masyarakat inilah yang menjadi fokus pokok tansosmas dalam melaksanakan rencana aksinya yang telah disusun bersama-sama dalam kegiatan bimbingan atau pemberdayaan sosial.

### **Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

Permasalahan kesejahteraan sosial pada realita kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan dilihat dari jenis dan jumlahnya bisa dikatakan cukup kompleks. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut mulai dari yang konvensional sampai dengan yang sifatnya kekinian. Sifatnya konvensional bisa dikatakan antara lain kemiskinan, ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, dan yang lainnya. Sedangkan masalah sosial yang sifatnya kekinian bisa dikatakan antara lain kekerasan dalam rumah tangga, miras, narkoba, AIDS/HIV, korban bencana alam/sosial, dan yang lainnya. Penanganan permasalahan sosial pada level komunitas lokal biasanya sudah dilakukan, baik oleh aparat desa itu sendiri maupun para tokoh masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, penanganan yang dilakukan tersebut pada umumnya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain sumber daya manusianya yang masih kurang memadai, baik jumlah maupun kemampuannya, sumber dana, cara atau teknik penanganannya, dan lain sebagainya. Pada kenyataan di lapangan itu semua sangat berkaitan erat dengan tersedianya potensi

maupun sumber untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan sosial yang ada.

Pada saat usaha penggalian potensi maupun sumber yang terdapat di masyarakat biasanya diperlukan berbagai unsur yang terangkum dalam modal sosial (*social capital*). Terkait dengan modal sosial, Eva Cox (1995) dalam Hasbullah (2006) mendefinisikannya sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebijakan bersama. Sedangkan Paul Ballen dan Jenny Onix (1998) dalam Hasbullah (2006) menambahkan bobot terhadap dimensi modal sosial yang sangat penting yakni “kemampuannya sebagai basis sosial” untuk membangun masyarakat sipil yang sebenarnya. Sedangkan Hasbullah (2006) sendiri mengatakan bahwa, modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Pakar lainnya seperti Harrison (2000) mengartikan, bahwa *social capital* sebagai seperangkat rangkaian nilai-nilai internal atau norma-norma yang disebarkan di antara anggota-anggota suatu kelompok yang mengizinkan mereka untuk bekerjasama antara satu dengan yang lain. Lebih jauh dikatakan, bahwa prasyarat penting untuk munculnya *social capital* adalah adanya kepercayaan (*trust*), kejujuran (*honesty*), dan hubungan timbal balik (*reciprocity*). Sementara itu Serageldin dan Grosstaer (1999) mendefinisikan *social capital* sebagai seperangkat cara, jalinan kerja, dan organisasi yang dapat meningkatkan akses manusia terhadap akses kekuasaan dan sumber penting yang dapat digunakan dalam mengambil

keputusan dan memformulasikan kebijakan. Sedangkan JH Turner (1991) mengatakan, bahwa *social capital* lebih menekankan pada hubungan sosial dan pola-pola organisasi sosial yang diciptakan untuk memperoleh kekuatan yang potensial untuk perkembangan ekonomi. Ia juga mengaitkan *social capital* dengan analisis mikro, mezzo, dan makro sehingga *social capital* tidak bisa dijelaskan dengan istilah modal (investasi) sebagaimana yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari atau pada tataran dunia usaha. Kenneth (2000) menambahkan, bahwa beberapa persyaratan dalam *social capital* adalah a) *Trust one another*; b) *Sharing the right values*; dan c) *Truth telling, meeting obligations and reciprocity*. Sedangkan menurut Woolcock, et al (2000) mengatakan, bahwa *social capital* lebih merujuk pada norma-norma dan jaringan yang memungkinkan orang-orang untuk bertindak secara kolektif. Jika mencermati beberapa de, nisi dari berbagai ahli di atas mengenai *social capital*, pada dasarnya di dalamnya mencakup beberapa hal seperti adanya unsur kepercayaan (*trust*), norma atau nilai yang harus disepakati setiap anggotanya, hubungan timbal balik (*reciprocity*), cara, organisasi, dan jalinan kerja.

Dari beberapa deñisi tersebut, unsur-unsur yang terdapat didalamnya menjadi acuan dalam pelaksanaan model desa berketahanan sosial melalui pokja tansosmas. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan pokja tansosmas dalam melakukan berbagai aktivitas kemasyarakatan di lapangan menunjukkan banyak respon positif, baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat formal. Seperti di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat direspon oleh pejabat formal mulai dari Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi maupun Bupati dalam memberikan dana stimulan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pokja

tansosmas di beberapa desanya (Suhendi dkk, 2007). Selain itu di Provinsi Sulawesi Barat yang direspon Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang merespon dengan menganggarkan dana APBD-nya untuk pelaksanaan kegiatan Model Desa Berketahanan Sosial. Demikian pula yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Wakil Gubernur dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pokja Tansosmas yang dilakukan di Desa Cikahuripan Kecamatan Ciselok yang berada di Kabupaten Sukabumi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial maupun bidang lainnya dengan cara mendukung dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal itu dilakukan dalam rangka mengapresiasi dan men-*support* pokja tansosmas untuk pembangunan desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakatnya (Suhendi dkk, 2008). Melalui pokja tansosmas yang didalamnya tergabung para tokoh masyarakat lokal, mereka memotivasi berbagai unsur masyarakat agar ikut bergabung untuk melakukan pembangunan kesejahteraan sosial dan bidang lainnya di lingkungan komunitas mereka.

### **Peranan Tokoh Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan yang dilakukan baik di tingkat perkotaan maupun perdesaan pada dasarnya harus melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Apalagi dalam pembangunan bidang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat seperti pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilakukan pada komunitas atau masyarakat. Pada pelaksanaan pembangunan tersebut, maka tokoh masyarakat lokal memegang peranan yang sangat penting. Berkaitan dengan itu menurut Resti, bahwa “dalam pelaksanaan program pembangunan membutuhkan penanganan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Untuk

dapat mensukseskan program pembangunan selain dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan pemimpin yang bersedia tampil dalam setiap pembangunan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap pelopor, berani, memberikan contoh dan teladan yang baik serta rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pedesaan ditentukan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan pemimpin-pemimpinnya di dalam menggerakkan semangat pembangunan. Kondisi masyarakat yang keanekaragaman adat istiadat dan norma-norma sosial memberikan corak yang berbeda dalam bentuk organisasi tata pemerintahan desa. Keanekaragaman ini mengakibatkan munculnya tokoh-tokoh kepemimpinan yang kompleks. Selain terdapat pemimpin formal (Kepala Desa) terdapat juga para tokoh pemimpin informal yang keberadaannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemimpin formal dan informal memberikan pengaruh terhadap program pembangunan, sehingga untuk dapat melaksanakan program pembangunan diperlukan kerjasama antara tokoh pemimpin formal maupun informal”, dalam masyarakat lokal.

Menurut Narotama dalam Kartodirdjo (1986), menyebutkan bahwa dalam setiap masyarakat secara wajar timbullah dua kelompok yang berbeda perannya sosialnya, yaitu yang memimpin sebagai golongan kecil yang terpilih dan kelompok yang dipimpin, ialah orang kebanyakan. Kartodirdjo juga menjelaskan bahwa akibat adanya interaksi antara orang dengan kepribadian yang kuat dengan faktor situasional akan menghasilkan pemimpin. Hal ini oleh Kartodirdjo disebut sebagai teori kepribadian dalam situasi. Lebih rinci lagi ialah bahwa kepemimpinan adalah pertemuan antara pelbagai faktor; 1)

Sifat dan golongannya, 2) Kepribadian, dan 3) Situasi atau Kejadian. Terkait penjelasan tersebut Narotama dalam Wiriadihardja (1987) menyebutkan, bahwa yang dimaksud sebagai pemimpin (*Leader*) adalah seorang yang dengan cara apapun, mampu mempengaruhi pihak orang lain untuk berbuat sesuatu, sesuai dengan kehendak orang itu sehingga tujuan yang telah ditentukan tercapai. Tidak jauh berbeda, pemimpin juga didefinisikan sebagai pengaruh antar personal yang dilaksanakan dalam suatu keadaan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan khusus, melalui proses komunikasi. Lebih lanjut Narotama dalam Etzioni (1985) menjelaskan, bahwa pemimpin dapat dibagi menjadi dua yaitu formal dan informal. Etzioni menambahkan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin informal adalah seorang individu yang mampu mengendalikan bawahan berdasarkan kekuatan pribadinya. Sedangkan seorang yang sekaligus memiliki kekuasaan posisional dan kekuatan pribadi disebut pimpinan formal. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan pemimpin adalah seseorang yang memiliki tujuan dan dapat mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemimpin lokal dalam penelitian ini adalah individu yang mempunyai tujuan atau maksud yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan yang mempengaruhi atau memotivasi masyarakat sekitarnya. Besarnya pengaruh dari tindakan tersebut dipengaruhi oleh modal yang dimiliki oleh pemimpin lokal. Peranan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal dalam pembangunan salah satunya adalah dengan melihat partisipasi pemimpin lokal tersebut dalam program pembangunan. Mengaitkan dengan teori tersebut Narotama dalam Cohen dan Uphoff (1979) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan kegiatan, tahapan tersebut yaitu sebagai berikut; 1) Tahap pengambilan keputusan, diwujudkan dengan

keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini adalah proses perencanaan suatu kegiatan; 2) Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek; 3) Tahap menikmati hasil, yang menjadi indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran; 4) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Demikian halnya dalam penelitian yang dilakukan terkait dengan model desa berketahanan sosial, berdasarkan capaian hasil pelaksanaan di lapangan mulai tahun 2005-2012 telah dibentuk 49 (empat puluh sembilan) pokja tansosmas di 47 desa atau kelurahan pada 29 (dua puluh sembilan) kabupaten/kota di 24 (dua puluh empat) provinsi di Indonesia. Kedua puluh empat provinsi tersebut antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Keberadaan pokja tansosmas di desa atau kelurahan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari perangkat desa tersebut dapat mengangkat desa yang bersangkutan ketika diikutkan dalam lomba desa di tingkat

pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sebagai contoh **Desa Sigi** (desa tertinggal) yang terdapat di **Kabupaten Pulang Pisau** (kabupaten tertinggal) Provinsi Kalimantan Tengah telah terpilih menjadi "**Desa Mandiri dan Desa Teladan**" setelah program Model Desa Berketahanan Sosial dari Badiklit Kesos dilaksanakan di desa tersebut pada tahun 2007. Berkat keberhasilan desa tersebutlah, maka Kepala Desa Sigi diundang sebagai nara sumber di satu lembaga keswadayaan masyarakat di Belanda. Sementara itu di **Kabupaten Sukabumi** (kabupaten tertinggal) Provinsi Jawa Barat juga terdapat salah satu desa yakni **Desa Cikahuripan** yang merupakan desa di lingkungan pantai Pelabuhan Ratu, setelah program tersebut diimplementasikan pada tahun 2008, maka desa tersebut semakin dikenal keberadaannya sehingga berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi menghampiri untuk meluncurkan programnya masing-masing. Pada tahun 2010 Desa Cikahuripan terpilih menjadi "**Desa Peradaban**", setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari ratusan desa yang ikut dalam lomba desa di Provinsi Jawa Barat. Dari prestasi yang dicapai itulah, maka Desa Cikahuripan mendapatkan dana yang jumlahnya sampai miliaran rupiah untuk pembangun desa tersebut. Selain dua desa sebagai contoh dan sekaligus sebagai succes story, masih banyak desa ataupun kelurahan yang dianggap dapat meningkatkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang lain yang telah dilakukan berkat peranan tokoh masyarakat lokal sebagai perwujudan turut serta ambil bagian di dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

## KESIMPULAN

Pada kenyataan atau realita kehidupan sehari-hari di masyarakat, permasalahan sosial dapat muncul di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Jenis dan jumlah

permasalahan sosial pun cukup kompleks karena berbagai faktor yang menyertainya. Penanganan secara efektif dan efisien terhadap permasalahan sosial pun menjadi penting, sehingga harus dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait sekalipun yang muncul pada tingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan peranan tokoh masyarakat lokal yang diwujudkan dalam pranata sosial yang tergabung dalam kelompok kerja ketahanan sosial masyarakat untuk menangani permasalahan sosial yang ada. Peranan tokoh masyarakat lokal yang proaktif, maka keberfungsian kelompok kerja ketahanan sosial masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan dapat menjalankan peranannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Badiklit Kesos melalui Puslitbang Kesos mencoba merespon dan menjawab kekurangberfungsian pranata sosial di desa atau kelurahan pada komunitas lokal. Melalui penelitian Puslitbang Kesos dalam memberdayakan pranata sosial didalamnya terdiri dari tokoh masyarakat lokal. Sehingga pranata sosial tersebut dapat berkiprah di masyarakat dalam menunjang pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang lainnya. Jika pranata sosial sudah berkiprah dan berperan secara maksimal, maka permasalahan kesejahteraan sosial yang ada pada komunitas lokal sangat mungkin dapat ditangani dan ditanggulangi dengan baik walaupun pada tataran lokal.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan di atas, maka dianggap perlu untuk mengemukakan beberapa rekomendasi terkait dengan peranan tokoh masyarakat lokal yang tergabung dalam Pokja Tansosmas dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Di rekomendasikan yaitu; 1) Pada pelaksanaan program bimbingan atau pemberdayaan sosial terhadap berbagai unsur tokoh masyarakat lokal atau pranata

sosial lokal yang sifatnya partisipatif, maka perlu terus dilakukan penelitian aksi dengan model yang sudah ada; dan 2) Keberadaan Pokja Tansosmas yang sudah berkiprah dapat ditindaklanjuti oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dijadikan mitra kerja sebagai titik masuk (*entry point*) dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan menggelontorkan program yang terkait di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dasgupta, Partha dan Ismail Serageldin. (2000). *Social Capital: A Multifaced Perpective*. Washington D.C: The World Bank.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2002). *Pedoman Umum Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat.
- Harrison. LE dan Hutington. SP. (eds). (2000). *Culture Matters, How Values Shap, Human Progress*. New York: Basic Book.
- Hasbullah, Jousairi. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- IPB. (n.d.). Pengaruh Pemimpin Lokal Terhadap Keberhasilan Program. <http://mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL%20IPB/Pengaruh%20Pemimpin%20Lokal%20Terhadap%20Keberhasilan%20Program%20Pembangunan>.

- Huda, Miftachul. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kenneth, J Arrow. (2000). *Observations on Social Capital in Partha Dasgupta & Ismail Serageldin (eds), Social Capital: A Multifaced Perpective*. Washington D.C: The World Bank.
- Anonim. (2010, Juni 6). Ekpresi Kebebasan Harus Beretika. *Media Indonesia*.
- Resti, Dhiassari Paramita. (2013). *Peran Tokoh Pemimpin Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Pedesaan*. <http://ruraleconomics.14.ugm.ac.id/wp-content/uploads>.
- Soetarso. (1980). *Pelayanan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Suhendi, Ahmad, dkk. (2007). *Modul Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat.
- Suhendi, Ahmad. Wuryandari, Ani. & Endah Triyati. (2007). *Replikasi Model Desa Berketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Pranata Sosial*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat.
- Suhendi, Ahmad, dkk. (2008). *Pengembangan Desa Berketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Pranata Sosial (Replikasi Model di Empat Provinsi)*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (2012).
- Tanto, Djoko S. (2012). *Revitalisasi Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Stabilitas Politik*. [http://djsutanto.blogspot.com/2012\\_06\\_01\\_archive.html](http://djsutanto.blogspot.com/2012_06_01_archive.html).
- Woolcock, Michael. & Deepa, Narayan. (2000). *Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy (Final Version)*. US: The World Bank Research Observer.